

## Bab 2

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dinas Perkebunan merupakan suatu organisasi kelembagaan pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya alam pada subsektor perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian. Sebagai pengelola subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan bertanggungjawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor perkebunan saat ini, dan perencanaan pengembangan subsektor perkebunan di masa yang akan datang.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dulunya bernama Jawatan Karet (tahun 1953) yang terbentuk dari dua lembaga yaitu Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang dari Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kemudian pada tahun 1969, Dinas Karet berubah menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur melalui Perda Nomor 06 tahun 1978. Sekitar enam tahun kemudian, disusunlah Perda Nomor 06 tahun 1984 dimana Dinas Perkebunan Rakyat berubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur yang kemudian dibentuk melalui Surat keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001, lalu disempurnakan melalui Perda Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004, bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur berubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur hingga periode sekarang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berusaha keras menggali setiap potensi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur baik dari segi sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Sebagai organisasi teknis yang berkaitan langsung dengan lapangan, Dinas Perkebunan harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga teknis yang handal di bidang perkebunan tanpa melupakan penerapan *good governance* secara kontinu dan konsisten di setiap tahapan program kegiatannya. Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan memiliki visi dan misi yang selaras dengan pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi. Oleh sebab itu

Dinas Perkebunan harus memprioritaskan pada peningkatan kualitas, mutu, kecepatan, konsistensi, serta efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Era reformasi birokrasi dalam organisasi teknis seperti Dinas Perkebunan memberikan fokus kepada pelayanan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas petani perkebunan dalam menjalankan setiap aktivitas perkebunannya. Pelaksanaan otonomi daerah juga sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan subsektor perkebunan karena pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dapat secara langsung menentukan langkah-langkah solutif setiap terjadi permasalahan di lapangan. Di samping itu, Dinas Perkebunan memiliki wewenang yang lebih besar dalam menentukan program prioritas untuk selanjutnya direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang relevan dan sesuai dengan kondisi sumber daya di Provinsi Kalimantan Timur (struktur dan gestur tanah, cuaca, iklim, masyarakat, hingga fenomena sosial ekonomi yang terus berubah).

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan**

### **2.1.1. Tugas Pokok Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 mengenai pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan bahwa tugas pokok Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah “membantu Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan perkebunan”.

Dari tugas pokok utama sebagai pembantu gubernur dalam mengelola teknis subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, maka di setiap bagian, bidang, dan UPTD lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Fungsi sebagai berikut :
  - a. Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
  - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Pengembangan Komoditi, mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan;
  - b. Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
  - c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
  - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
  - e. Perencanaan dan penyediaan Alsintan di bidang perkebunan;
  - f. Pengembangan kelembagaan perkebunan dan peningkatan SDM;
  - g. Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- 3) Bidang Usaha, mempunyai tugas Merencanakan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi perijinan, penanganan konflik dan pembinaan kebun kemitraan serta melakukan pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan proses pemberian advis teknis usaha perkebunan;
  - b. Mengembangkan sistem informasi usaha perkebunan;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
  - d. Membina dan mengawasi kinerja usaha perkebunan;
  - e. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
  - f. Mendorong usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
  - g. Menginventarisasi, identifikasi dan penanganan konflik usaha perkebunan;
  - h. Mengembangkan dan membina kemitraan antara usaha perkebunan dan masyarakat;

- i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
  - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- 4) Bidang Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - b. Pembinaan dan Pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
  - c. Mengkoordinasikan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
  - d. Memfasilitasi peningkatan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar;
  - e. Memfasilitasi pelayanan informasi pasar;
  - f. Mempromosikan produk komoditas perkebunan;
  - g. Memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
  - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- 5) Bidang Perkebunan Berkelanjutan, mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
  - b. Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
  - c. Mengkoordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
  - d. Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
  - e. Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
  - f. Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
  - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

- 6) UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
  - c. Penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
  - d. Mensertifikasikan bibit kebun plasma/kemitraan;
  - e. Mengkoordinasikan tugas penanganan kasus benih ilegal;
  - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- 7) UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas mengembangkan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH), melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Memproduksi dan mengembangkan Bio Perstisida dan APH;
  - b. Mengembangkan teknologi pengendalian OPT;
  - c. Menyebarkan dan memasarkan Bio Perstisida dan APH;
  - d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan Bio pestisida dan APH;
  - e. Mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  - f. Memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan ekspansi OPT;
  - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- 8) UPTD Teknologi Terapan Perkebunan, mempunyai tugas menyiapkan bahan tanam dan teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan bahan tanam perkebunan;
  - b. Membangun dan mengembangkan kebun koleksi dan kebun induk ;
  - c. Menerapkan dan mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan;

- d. Memberikan bimbingan teknis teknologi pengolahan hasil bagi pelaku usaha perkebunan;
- e. Mengaplikasi dan menyebarluaskan teknologi tepat guna dalam pengembangan pengolahan hasil perkebunan;
- f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

### **2.1.2. Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Dinas Perkebunan merupakan organisasi pemerintah yang memiliki peran vital dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Setiap fungsi-fungsi elemen Dinas Perkebunan memiliki tujuan teknis dalam pembangunan subsektor perkebunan. Berdasarkan tugas pokok Dinas Perkebunan yang tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016, maka dapat diketahui fungsi secara umum Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan, produksi dan usaha, serta perlindungan tanaman perkebunan;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
5. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 mengenai pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan komposisi sebagai berikut:

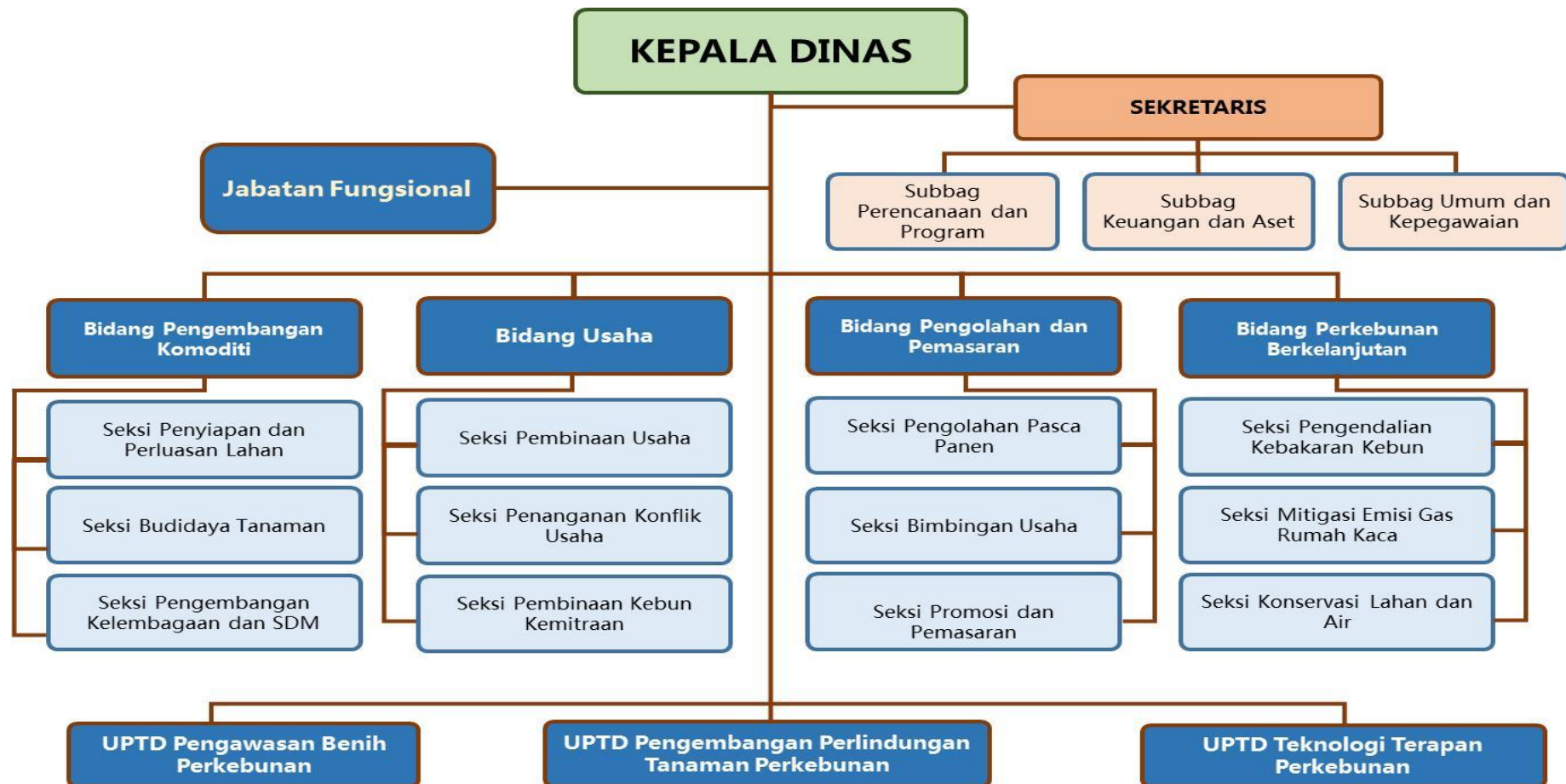
- 1) Kepala Dinas Perkebunan
- 2) Sekretariat, terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Bidang-bidang teknis yang terdiri dari:
- a. Bidang Pengembangan Komoditi:
    - Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan
    - Seksi Budidaya Tanaman
    - Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM
  - b. Bidang Usaha:
    - Seksi Pembinaan Usaha
    - Seksi Penanganan Konflik Usaha
    - Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan
  - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran:
    - Seksi Pengolahan Pasca Panen
    - Seksi Bimbingan Usaha
    - Seksi Promosi dan Pemasaran
  - d. Bidang Perkebunan Berkelanjutan:
    - Seksi Pengendalian Kebakaran
    - Seksi Emisi Gas Rumah Kaca
    - Seksi Konservasi Lahan dan Air
- 4) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari:
- a. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP):
    - Seksi Identifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih
    - Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih
    - Sub Bagian Tata Usaha
  - b. UPTD Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP):
    - Seksi Pengendalian OPT
    - Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH
    - Sub Bagian Tata Usaha
  - c. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan (T2P):
    - Seksi Penyediaan Bahan Tanaman

- Seksi Teknologi Terapan Pengolahan Hasil
- Sub Bagian Tata Usaha



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan harus memiliki kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan bidangnya. Secara keseluruhan, jumlah aparatur pemerintahan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 110 personil dimana 66 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 44 pegawai perempuan.

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai, maka sebagian besar pegawai memiliki pendidikan SLTA (39 pegawai) Sarjana S1 (48 pegawai) yang diikuti oleh pegawai yang menamatkan pendidikannya pada jenjang S2 (16 pegawai). Meskipun begitu, masih terdapat pegawai yang hanya memiliki pendidikan SLTP yakni sebanyak 2 pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Perkebunan**  
**Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2	0	2
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	22	17	39
3.	Diploma Satu (D-1)	1	0	1
4.	Diploma Tiga (D-3)	3	1	4
5.	Sarjana (S-1)	26	22	48
6.	Sarjana (S-2)	12	4	16
7.	Sarjana (S-3)	0	0	0
Jumlah		66	45	110

Keterangan: Data Bulan Desember 2016

Jika dilihat berdasarkan pangkat dan golongannya, maka sebagian besar pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki pangkat dan golongan III/d (Penata Tk. I) sebanyak 22 pegawai yang diikuti pegawai dengan pangkat dan

golongan III/a (Penata Muda) sebanyak 18 pegawai. Secara rinci, komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Dinas Perkebunan**  
**Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I/d Juru Muda	0	0	0
2.	II/a Pengatur Muda	3	0	3
3.	II/b Pengatur Muda Tk. I	3	0	3
4.	II/c Pengatur	3	4	7
5.	II/d Pengatur Tk. I	2	2	4
6.	III/a Penata Muda	11	7	18
7.	III/b Penata Muda Tk.I	9	8	17
8.	III/c Penata	6	11	17
9.	III/d Penata Tk. I	16	6	22
10.	IV/a Pembina	5	6	11
11.	IV/b Pembina Tk. I	6	0	6
12.	IV/c Pembina Utama Muda	1	0	1
13.	IV/e Pembina Utama	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>44</b>	<b>110</b>

Keterangan: Data Bulan Desember 2016

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Dinas Perkebunan**  
**Berdasarkan Jabatan Struktural-Fungsional dan Jenis Kelamin**

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eselon I	1	0	1
2.	Eselon II.A	1	1	1
3.	Eselon III.A	5	0	5
	Eselon III.B (UPTD)	2	0	2
4.	Eselon IV.A	14	10	24
5.	Fungsional	8	4	12
6.	Non Struktural	34	31	65
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>45</b>	<b>110</b>

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1 (satu) orang eselon I, 1 (satu) orang eselon II ; 7 (Tujuh) orang eselon III; dan 24 orang eselon IV. Selain itu, Dinas Perkebunan memiliki 12 pegawai yang memegang jabatan fungsional serta 65 pegawai non struktural.

Sumber daya manusia merupakan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan daerah baik secara administrasi maupun teknis. Begitu pula dengan Dinas Perkebunan, instansi yang bergerak di subsektor perkebunan ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan spesifikasi khusus di bidang pertanian (khususnya subsektor perkebunan). Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di dalam organisasi selevel Dinas Perkebunan perlu dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang dan UPTD agar tercipta suasana profesionalitas dalam bekerja namun tetap berada pada koridor pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kelengkapan dan kualitas sarana prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berasal dari anggaran APBD maupun APBN, dimana dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang**  
**Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(6)
1.	Kantor	4 Unit (termasuk 3 UPTD)	
2.	Kendaraan Roda 4	17 Buah	
3.	Kendaraan Roda 2	154 Buah	
4.	Bemo	4 Buah	
5.	Generator	4 Buah	
6.	GPS	34 Buah	
7.	Scanner	29 Buah	

<b>No</b>	<b>Jenis Perlengkapan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(6)
8.	AC	33 Buah	
9.	Proyektor	16 Buah	
10.	Personal Computer	27 Buah	
11.	Rak-rak penyimpanan	10 Buah	
12.	Lemari penyimpanan	14 Buah	
13.	Drybox	2 Buah	
14.	Mesin Ketik Manual Std	1 Buah	
15.	Mesin Ketik Elektronik	1 Buah	
16.	Mesin Hitung Elektronik	2 Buah	
17.	Mesin Absen	2 Buah	
18.	Mesin Foto Copy	1 Buah	
19.	Lemari Besi	1 Buah	
20.	Rak Besi	17 Buah	
21.	Rak Kayu	1 Buah	
22.	Filling Besi	5 Buah	
23.	Filling Kayu	9 Buah	
24.	Berangkas	3 Buah	
25.	Kardek Kayu	67 Buah	
26.	Papan Visual	2 Buah	
27.	Penghancur Kertas	2 buah	
28.	White Board	6 Buah	
29.	Display	4 Buah	
30.	Software/ Aplikasi	2 Buah	
31.	Lemari Kayu	10 Buah	
32.	Meja Besi	3 Buah	
33.	Meja Kayu	86 Buah	
34.	Meja Lainnya	55 Buah	
35.	Kursi Rapat	91 Buah	
36.	Kursi Tamu	10 Buah	
37.	Kursi Putar	83 Buah	
38.	Kursi Biasa	13 Buah	

<b>No</b>	<b>Jenis Perlengkapan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(6)
39.	Kursi Lipat	7 Buah	
40.	Meja Komputer	13 Buah	
41.	Sofa	7 Buah	
42.	Penghisap Debu	1 Buah	
43.	Pemotong Rumput	3 Buah	
44.	Penyedot Air	4 Buah	
45.	Kipas Angin	2 Buah	
46.	Telivisi	12 Buah	
47.	Wireless	1 Buah	
48.	Microphone	44 Buah	
49.	Camera/Tustel	19 Buah	
50.	Handycam/Camera Video	14 Buah	
51.	Software/Aplikasi	1 Buah	
52.	Personal Computer	66 Buah	
53.	Laptop	79 Buah	
54.	Printer	60 Buah	
55.	Server	1 Buah	
56.	Peralatan Jaringan	2 Buah	
57.	Meja Kerja Ess	78 Buah	
58.	Meja Kerja	60 Buah	
59.	Meja Tamu	2 Buah	
60.	Lemari Buku Perpus	8 Buah	
61.	LEmari Arsip	8 Buah	
62.	Power Supply	44 Buah	
63.	Sound System	1 Buah	
64.	Loudspeaker	71 Buah	
65.	Pesawat Telephone	14 Buah	
66.	Handy Talky	4 Buah	
67.	Faximile	2 Buah	
68.	Alat Komunikasi Radio SSB	5 Buah	

### 2.2.3. Keuangan

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan. Berikut ini gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2016 yang bersumber dari APBD maupun APBN.

#### a. Realisasi APBD 2014 s.d. 2016

Perkembangan pagu anggaran dari tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2014, pagu anggaran Dinas Perkebunan sebesar Rp.60.571.250.877,75,- dan menurun menjadi sebesar Rp.43.419.618.200,- pada tahun 2016 atau mengalami penurunan hingga mencapai 28.31 persen.

Pada bagian realisasi keuangan, tahun 2014 Dinas Perkebunan menggunakan anggaran hanya mencapai 87,87 persen dari pagu yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 82,06 persen, dan tahun 2016 mencapai 91,71 persen. Untuk rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persen</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	60.571.250.877.75	53.225.253.295	87.87
2015	57.033.594.499,97	47.112.495.364	82,06
2016	43.419.618.200	39.822.210.981	91,71
<b>Total</b>	<b>161.024.463.577,72</b>	<b>140.159.959.640</b>	<b>87.04</b>

*Data realisasi bulan Desember 2016*

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan  
Provinsi Kalimantan Timur 2014 – 2016**

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	7,185,049,500	-	-	6,037,464,019	-	-	0.84	-	-	-	-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1,785,700,000	-	-	1,460,733,801	-	-	0.82	-	-	-	-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	3,617,265,000	-	-	3,277,827,784	-	-	0.91	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	20,988,116,000	-	-	17,598,437,094	-	-	0.84	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	569,025,000	-	-	401,541,850	-	-	0.71	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	1,995,000,000	-	-	1,338,706,500	-	-				-	-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	-	1,200,500,000	795,200,000	-	1,152,588,900	769,894,743	-	0.96	0.97	(33.76)	(33.20)
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	-	162,225,000	193,625,000	-	130,364,750	156,922,400	-	0.80	0.81	19.36	20.37
Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	-	1,386,100,000	1,113,905,000	-	1,150,860,851	1,017,035,538	-	0.83	0.91	(19.64)	(11.63)
Program Pengembangan Data/Informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	-	2,585,150,000	2,039,973,950	-	2,124,467,035	1,942,949,153	-	0.82	0.95	(21.09)	(8.54)
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	-	1,157,000,000	511,587,750	-	962,092,148	495,599,340	-	0.83	0.97	(55.78)	(48.49)
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	-	804,140,000	561,380,000	-	757,569,264	559,723,087	-	0.94	1.00	(30.19)	(26.12)
Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	-	267,750,000	45,750,000	-	235,505,700	35,509,890	-	0.88	0.78	(82.91)	(84.92)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	-	656,250,000	724,403,600	-	419,181,400	350,067,830	-	0.64	0.48	10.39	(16.49)
Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	-	1,420,400,000	2,511,200,000	-	1,154,107,270	2,469,710,125	-	0.81	0.98	76.80	113.99
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	-	1,454,475,000	1,377,960,000	-	1,283,478,306	1,342,178,205	-	0.88	0.97	(5.26)	4.57
Program Perluasan Kebun Sawit	-	7,526,550,000	4,964,006,300	-	3,110,830,840	4,953,087,369	-	0.41	1.00	(34.05)	59.22
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	-	6,629,200,000	3,072,858,450	-	5,263,978,737	2,409,427,650	-	0.79	0.78	(53.65)	(54.23)
Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	-	-	25,000,000	-	-	15,044,800	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	-	-	120,650,000	-	-	118,736,475	-	-	-	-	-



**b. Sumber Dana APBN 2014 s.d. 2016**

Selain mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari 3 (tiga) Direktorat yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total pagu APBN selama tiga tahun sebesar Rp. 33.754.78.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi per tahun dari APBN sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Rekapitulasi Pagu dan Realisasi APBN Dinas Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2016**

**Satker Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (05) Ditjenbun**

Alokasi	2014		2015		2016	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DK Dinas Perkebunan	1.585.828.000	921.966.275	4.609.545.000	3.360.854.200	1.870.628.000	1.404.664.625
TP Provinsi Disbun	3.097.397.000	1.976.005.700	11.298.361.000	8.023.643.075	3.030.632.000	1.780.023.750
<b>TP Mandiri :</b>						
1. Kab. Kutai Barat	2.182.607.000	1.821.694.000	2.889.408.000	2.088.986.750		
<b>Total DK dan TP Tahun</b>	<b>6.865.832.000</b>	<b>4.719.665.975</b>	<b>18.797.314.000</b>	<b>13.473.484.025</b>	<b>4.901.260.000</b>	<b>3.184.688.375</b>

**Satker Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (07) Ditjen PPHP**

Alokasi	2014		2015		2016	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DK Dinas Perkebunan	427.600.000	347.638.300	619.175.000	564.723.750		
TP Provinsi Disbun	556.400.000	497.349.700				
<b>Total DK dan TP Tahun</b>	<b>984.000.000</b>	<b>844.988.000</b>	<b>619.175.000</b>	<b>564.723.750</b>		

**Satker Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (08) Ditjen PSP**

Alokasi	2014		2015		2016	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DK Dinas Perkebunan	450.000.000	228.479.470	300.000.000	211.602.100	300.000.000	263.604.400
TP Provinsi Disbun	837.200.000	736.561.300				
<b>Total DK dan TP Tahun</b>	<b>1.287.200.000</b>	<b>965.040.770</b>	<b>300.000.000</b>	<b>211.602.100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>263.604.400</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada dua kegiatan yaitu memperluas lahan perkebunan dan jumlah produksi yang di hasilkan, untuk perluasan aneka tanaman lainnya masih belum sepenuhnya mencapai target yang diamanahkan dalam RPJMD Perubahan hal ini diakibatkan oleh penurunan luas tanam yang dikarenakan tidak seimbangnya antara peremajaan (penggantian tanaman) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. selain itu adanya alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan turut menjadi penyebab penurunan luas tanam pada komoditi aneka tanaman ini, sementara penurunan produksi terjadi akibat penurunan luasan tanaman produktif dan kurangnya pemeliharaan tanaman secara intensif. Berikut ini adalah tabel dan diagram yang menunjukkan hasil kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2014-2016

**Tabel 2.8**  
**Pengembangan Luas Komoditi Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2016 (Hektar)**

NO	KOMODITI	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelapa Sawit	1.020.413	1.090.106	1.150.078
2	Karet	113.485	113.739	116.869
3	Kakao	9.514	8.296	7.931
4	Kelapa Dalam	26.674	22.887	22.897
5	Lada	9.497	9.606	9.382
6	Aneka Tanaman	7.838	6.579	5.820

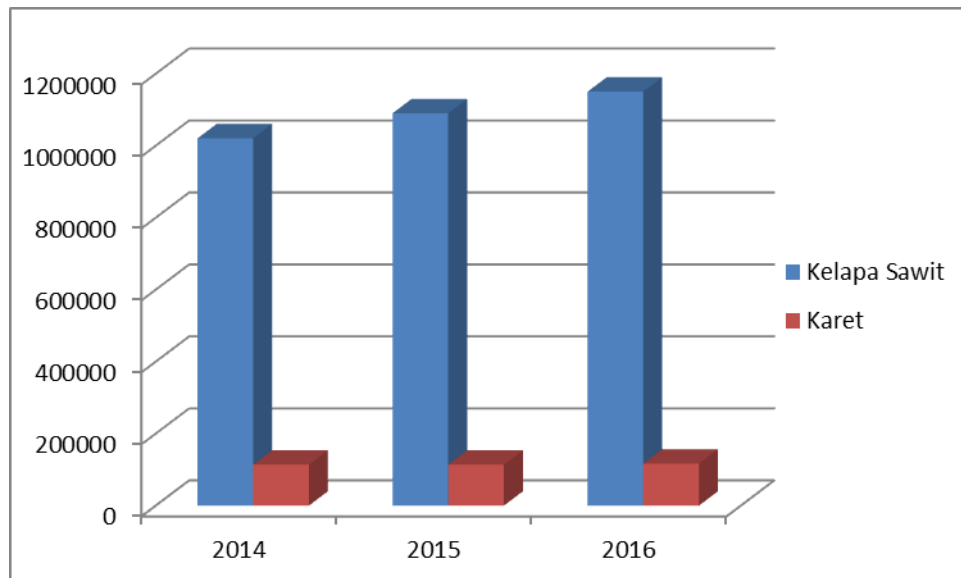
Sumber : Statistik Perkebunan 2016 Angka Teap

Pengembangan luas areal komoditi dilakukan untuk 5 komoditas utama yang merupakan komoditas unggulan subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur. Namun hanya ada dua komoditas yang luas arealnya mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu Kelapa sawit dan karet. Sedangkan komoditas lainnya seperti kakao, kelapa dalam, lada dan aneka tanaman lainnya mengalami penurunan luas areal selama periode tahun 2014-2016.

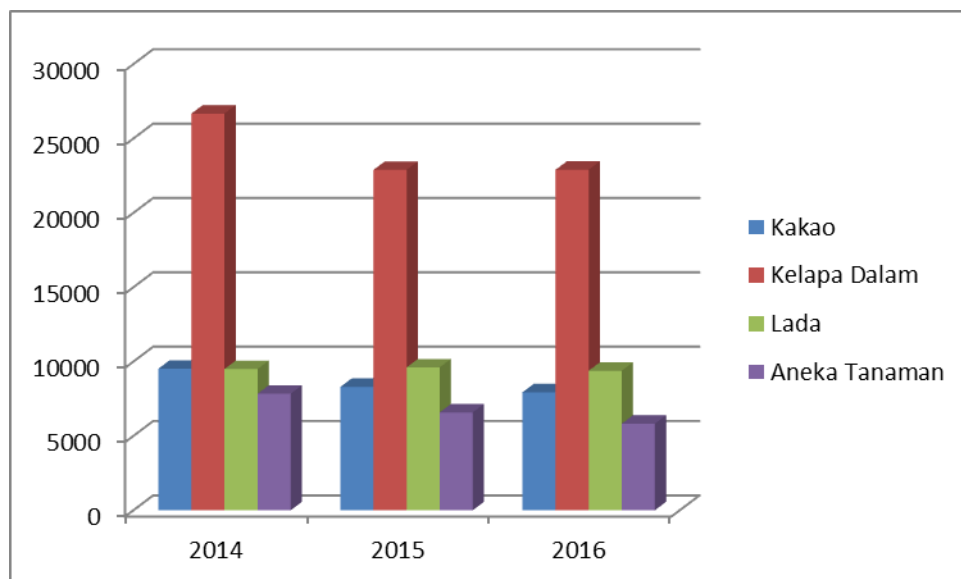
Luas areal perkebunan didominasi oleh komoditas perkebunan kelapa sawit dimana komoditas ini memiliki keuntungan yang cukup besar jika dibandingkan dengan komoditas lain. Untuk itu peran perkebunan rakyat perlu ditingkatkan baik luas maupun produksinya sehingga diharapkan agar pengembangan kelapa sawit di kaltim memberikan tingkat kesejahteraan bagi pekebun, sedangkan untuk PBS sesuai dengan Permentan No. 98 Tahun 2013 diharapkan

melaksanakan pembangunan pola kemitraan minimal sebanyak 20 persen dari luas tanam efektif untuk kebun yang diusahakan baik melalui pola revitalisasi dan non revitalisasi.

**Gambar 2.2**  
**Luas Areal Lahan Berdasarkan Komoditas Kelapa Sawit dan Karet di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2016**



**Gambar 2.3**  
**Luas Areal Lahan Berdasarkan Komoditas Kakao, Kelapa Dalam, Lada, dan Aneka Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2016**



Luas areal lahan perkebunan mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan karena semakin luas areal lahan yang ditanami maka peluang peningkatan hasil produksi perkebunan semakin besar.

**Tabel 2.9**  
**Produksi Komoditas Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2016 (Ton)**

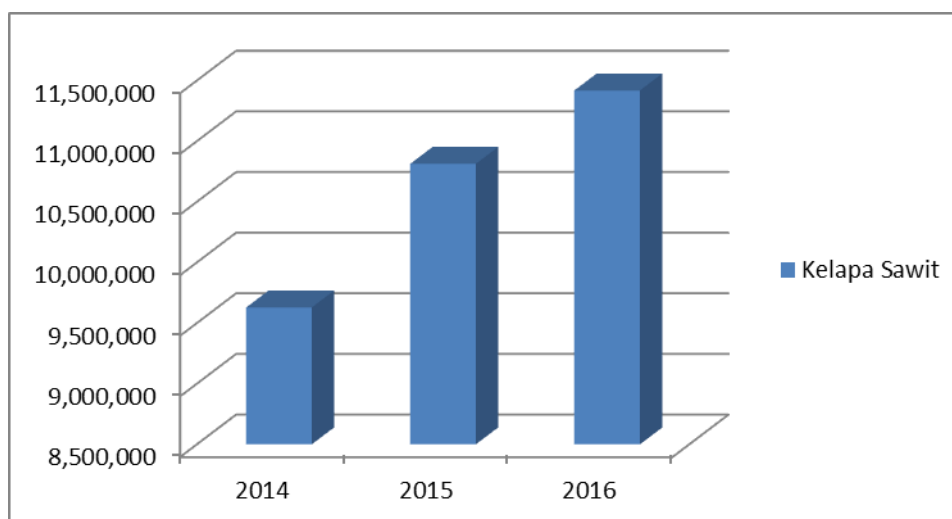
NO	KOMODITI	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelapa Sawit	9.628.072	10.812.893	11.418.110
2	Karet	63.281	65.738	62.106
3	Kakao	4.053	3.948	2.751
4	Kelapa Dalam	11.424	12.457	11.078
5	Lada	6.704	6.923	4.727
6	Aneka Tanaman	909	817	822

Sumber : Statistik Perkebunan 2016 Angka Tetap

Tabel 2.9 menunjukkan jumlah produksi yang dihasilkan dari setiap komoditas tanaman perkebunan unggulan di Provinsi Kalimantan Timur. Komoditas kelapa sawit menjadi komoditas unggulan utama di subsektor perkebunan dimana pada tahun 2014 produksi komoditas kelapa sawit mencapai 9.628.072 ton TBS dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 11.418.110 Ton TBS.

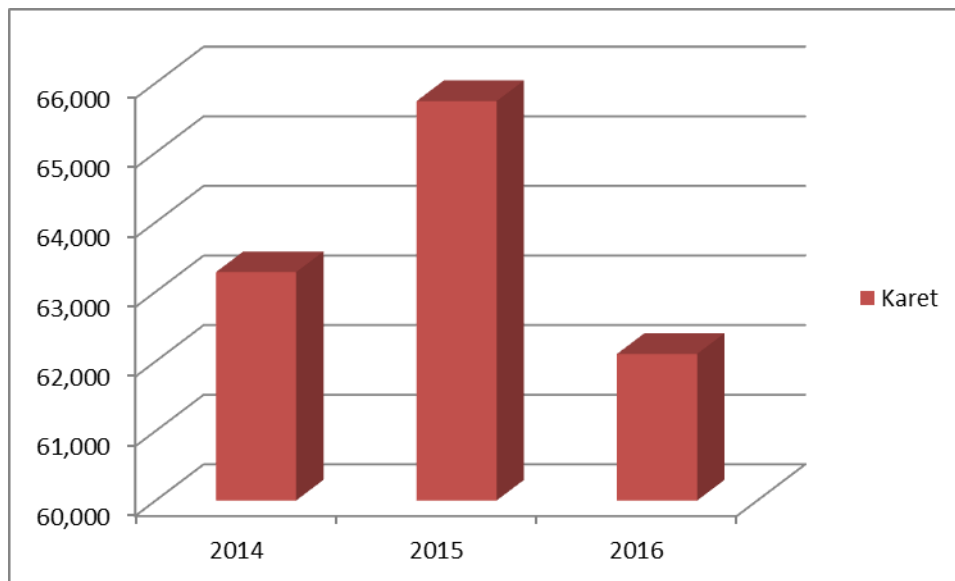
Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang mengalami tren kenaikan produksinya selama waktu tahun 2014-2016, sedangkan pada komoditas unggulan lainnya seperti karet, kakao, kelapa dalam, dan lada mengalami penurunan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Hal ini perlu adanya perhatian khusus terutama pada komoditas unggulan yang mengalami penurunan hasil produksi selama ini.

**Gambar 2.4**  
**Jumlah Produksi yang Dihasilkan Komoditas Kelapa Sawit**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2016**



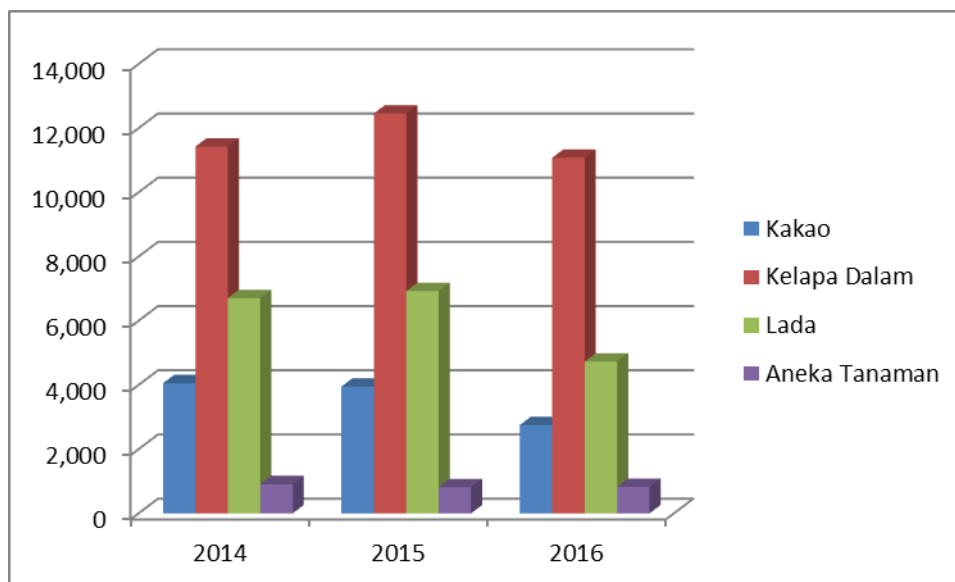
**Gambar 2.5**

### Jumlah Produksi yang Dihasilkan Komoditas Karet di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2016



**Gambar 2.6**

### Jumlah Produksi yang Dihasilkan Komoditas Kakao, Kelapa Dalam, Lada, dan Aneka Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2016



## 1. Pencapaian Sasaran Terwujudnya Lahan Perkebunan

Situasi yang berbeda terjadi pada capaian target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Perubahan Provinsi Kalimantan Timur terkait capaian luas areal lahan perkebunan. Dari kelima komoditas unggulan, hanya komoditas kelapa sawit dan karet saja yang mengalami kenaikan luas areal tanam setiap tahunnya. Untuk komoditas perkebunan unggulan Provinsi

kalimantan Timur lainnya yakni kakao, kelapa dalam, dan lada mengalami penurunan luas areal lahan setiap tahunnya.

Luas areal tanam perkebunan kelapa sawit dan karet mengalami peningkatan yang signifikan karena didukung oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar oleh perusahaan-perusahaan, sedangkan untuk tanaman lada, kelapa, kakao, dan aneka tanaman lainnya hanya didukung oleh perkebunan rakyat sehingga perkembangan luas arealnya lambat, bahkan mengalami penurunan.

Sebagai komoditas perkebunan unggulan utama, performa perkembangan komoditas kelapa sawit baik dari segi luas areal lahan maupun produksinya mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian luas di tahun 2016 yang mencapai 1.150.078 hektar lahan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur dimana angka tersebut memiliki capaian target sebesar 71.87 persen. Sedangkan pada komoditas karet, luas areal tanam di tahun 2016 mencapai 116.869 hektar atau sebesar 110.25 persen dari target RPJMD.

Lain halnya dengan tiga komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Timur lainnya seperti kakao, kelapa, dan lada yang secara umum mengalami penurunan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. Luas areal lahan tertinggi pada ketiga komoditas tersebut berada pada tahun 2014 hanya komoditi kelapa 26.674 hektar sedang untuk komoditi kakao dan lada yang bahkan capaian luasnya tidak mencapai target RPJMD ditahun 2016, pada komoditas kakao hanya memiliki luas areal lahan seluas 7.931 hektar (68.97% dari target), komoditas lada seluas 9.382 (89.35% dari target). Dari tabel 2.9 terlihat bahwa secara total, capaian luas areal lahan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak mencapai target yang ditetapkan, namun sebenarnya jika dikaji lebih dalam hanya komoditas kelapa sawit dan karet saja yang memiliki capaian positif. Perluasan areal lahan sawit yang signifikan menutupi penurunan luas lahan pada komoditas lainnya sehingga terkesan secara umum target RPJMD hampir mencapai target padahal sebenarnya masih ada kekurangan yang harus diperbaiki.

**Tabel 2.10**  
**Pengembangan Luas Komoditi Perkebunan**  
**di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2016 (Hektar)**

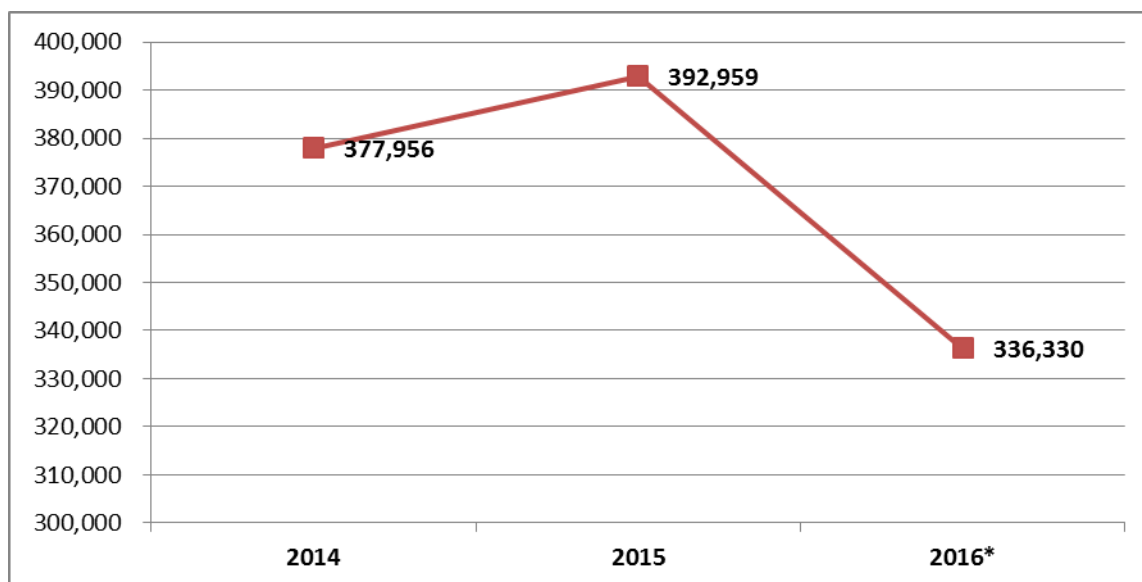
No	Komoditi	Capaian Target dan Capaian Luas Areal (Ha)								
		2014			2015			2016		
		Target RPJMD	Capaian Luas	%	Target RPJMD	Capaian Luas	%	Target RPJMD	Capaian Luas	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kelapa Sawit	1.200.000	1.020.413	85.03	1.400.000	1.090.106	77.86	1.600.000	1.150.078	71.87
2.	Karet	102.000	113.485	111.25	104.000	113.739	109.36	106.000	116.869	110.25
3.	Kakao	10.500	9.514	90.61	11.000	8.296	75.42	11.500	7.931	68.96
4.	Kelapa	20.500	26.674	130.12	21.000	22.887	108.98	21.500	22.897	106.49
5.	Lada	9.500	9.497	99.97	10.000	9.606	96.06	10.500	9.382	89.35
6.	Aneka Tanaman **)	-	7.838	-	-	6.579	-	-	5.820	-
Total		1.342.500	1.187.421	87.86	1.546.000	1.251.213	81,00	1.749.500	1.312.977	75.04

*Keterangan : Angka Statistik Perkebunan Tahun 2016*

Secara umum, total areal lahan perkebunan seperti yang tertera pada tabel di atas mengalami kenaikan setiap tahunnya pada periode 2014-2016 khusus untuk komoditi sawit dan karet. Selain itu, secara umum pula target pengembangan luas komoditas perkebunan pada RPJMD tidak mencapai target dan cenderung mengalami penurunan luasan di setiap tahunnya. Meskipun begitu, perlu dikaji lebih lanjut pada turunan luas areal lahan per komoditas perkebunan karena ada komoditas yang mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami peningkatan luas areal lahan.

Perluasan areal perkebunan juga membawa dampak positif bagi pencari kerja karena setiap ada pembukaan areal lahan komoditas perkebunan baru/perluasan lahan yang lama maka akan membuka lapangan pekerjaan di bidang subsektor perkebunan namun di tahun 2016 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja perkebunan dikarenakan beberapa perusahaan tidak melaporkan jumlah tenaga kerja yang riil serta pola perhitungan yang berbeda ditahun sebelumnya diperkirakan 1 orang tkp mengelola 2 Ha lahan yang kemudian berubah menjadi 1 org TKP mengelola 6 Ha lahan. Hal ini terlihat pada jumlah penyerapan tenaga kerja di subsektor perkebunan selama periode 2014-2016.

**Gambar 2.7**  
**Jumlah Tenaga Kerja di Subsektor Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2016**



*Sumber: Angka statistik perkebunan tahun 2016*

## 2. Pencapaian Sasaran Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan

Secara umum, produktivitas hasil pertanian di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan pada masa awal perencanaan. Kenaikan yang sangat positif ini dipicu oleh meningkatnya produksi



komoditas perkebunan unggulan utama Provinsi Kalimantan Timur yakni kelapa sawit dan diikuti kenaikan komoditas unggulan lainnya yakni karet.

Perluasan areal lahan komoditas kelapa sawit ternyata memberikan dampak yang positif bagi peningkatan hasil produksi komoditas tersebut. Capaian produksi kelapa sawit sebanyak 9.628.072 ton TBS pada tahun 2014 (100,29% dari target RPJMD) meningkat hingga mencapai angka 11.418.110 ton TBS pada tahun 2016 namun mengalami penurunan terhadap target RPJMD (12.400.000 ton TBS) yang berarti selama kurun waktu tiga tahun produksi kelapa sawit hanya mencapai 118.59 persen. Sedangkan pada komoditas karet, selama kurun waktu tiga tahun mengalami penurunan hasil produksi sebesar 1.85 persen dimana pada tahun 2014 capaian produksi sebesar 63.281 ton dan meningkat menjadi 62.106 ton pada tahun 2016.

Pada komoditas lainnya seperti kelapa, produksi panen mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir dimana pada tahun ketiga RPJMD yakni tahun 2016 produksi kelapa mencapai 11.078 ton (sebesar 121.24% dari target RPJMD). Sedangkan komoditas kakao dan lada secara umum mengalami penurunan hingga tahun 2016 dimana pada tahun 2016 produksi komoditas kakao sebesar 2.751 ton (hanya mencapai 28.89% dari target RPJMD) dan produksi komoditas lada sebesar 4.727 ton (dengan capaian 58.70% dari target RPJMD).

**Tabel. 2.11**  
**Produksi Komoditas Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2016 (Ton)**

No	Komoditi	Capaian Target dan Capaian Luas Areal (Ha)								
		2014			2015			2016		
		Target RPJMD	Capaian Produksi	%	Target RPJMD	Capaian Produksi	%	Target RPJMD	Capaian Produksi	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kelapa Sawit	9.600.000	9.628.072	100.29	11.200.000	10.812.893	96.54	12.400.000	11.418.110	92.08
2.	Karet	55.216	63.281	114.61	57.752	65.738	113.82	60.318	62.106	102.96
3.	Kakao	8.085	4.053	50.12	8.550	3.948	46.17	9.520	2.751	28.89
4.	Kelapa	6.430	11.424	177.66	7.496	12.457	166.78	9.137	11.078	121.24
5.	Lada	6.331	6.704	105.89	6.890	6.923	100.47	8.052	4.727	58.70
6.	Aneka Tanaman **)	-	909	-	-	817	-	-	822	-
Total		9.676.062	9.714.443	100.39	11.280.688	10.902.776	96.64	12.487.027	11.499.594	92.09

Sumber : Angka statistik perkebunan tahun 2016

**Tabel. 2.12**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada tahun Ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1.	Pengembangan luas areal tanaman sawit			1,000,000 Ha	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,020,413	1,090,106	1,150,078	0.85	0.78	0.72
2.	Pengembangan luas areal tanaman karet			110,000 Ha	102,000	104,000	106,000	113,485	113,739	116,869	1.11	1.09	1.10
3.	Pengembangan luas areal tanaman kakao			12,500 Ha	10,500	11,000	11,500	9,514	8,296	7,931	0.91	0.75	0.69
4.	Pengembangan luas areal tanaman lada			11,500 Ha	9,500	10,000	10,500	9,497	9,606	9,382	1.00	0.96	0.89
5.	Pengembangan luas areal tanaman kelapa dalam			22,500 Ha	20,500	21,000	21,500	26,674	22,887	22,897	1.30	1.09	1.06
6.	Peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit			18,000,000 Ton	9,600,000	11,200,000	12,400,000	9,628,072	10,812,893	11,418,110	1.00	0.97	0.92
7.	Peningkatan produksi perkebunan karet			65,537 Ton	55,216	57,752	60,318	63,281	65,728	62,106	1.15	1.14	1.03
8.	Peningkatan produksi perkebunan kakao			10,415 Ton	8,085	8,550	9,028	4,053	3,948	2,751	0.50	0.46	0.30
9.	Peningkatan produksi perkebunan lada			8,654 Ton	6,331	6,890	7,464	6,704	6,923	4,727	1.06	1.00	0.63
10.	Peningkatan produksi perkebunan kelapa dalam			9,680 Ton	6,430	7,496	8,301	11,424	12,457	11,078	1.78	1.66	1.33

Sebagai penunjang pergerakan ekonomi subsektor perkebunan terutama pada industri hilir, perusahaan besar swasta telah membangun pabrik kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah pabrik kelapa sawit saat ini mencapai 75 unit dan rencana pembangunan PKS sebanyak 17 unit. Perkembangan lokasi, kapasitas pabrik kelapa sawit, serta rencana pembangunan pabrik kelapa sawit dalam kurun waktu tiga tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Kapasitas Pabrik Minyak Kelapa Sawit**  
**Sampai dengan tahun 2016**

Kabupaten	Sampai dengan Tahun 2016		Rencana Pembangunan PKS	
	Total Kapasitas Ton (TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Total Kapasitas Ton (TBS/Jam)	Jumlah (Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	890	18	30	1
Penajam Paser Utara	300	6	45	1
Kutai Barat	135	3	-	-
Kutai Timur	1.255	28	255	6
Berau	480	7	45	1
Kutai Kartanegara	700	13	315	7
<b>Jumlah</b>	<b>3.760</b>	<b>75</b>	<b>690</b>	<b>17</b>

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai dinas teknis yang sebagian tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani perkebunan, Dinas Perkebunan harus memiliki *focus minded* pada pelayanan prima terhadap "konsumen"nya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah tantangan besar bagi Dinas Perkebunan untuk menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik. Melalui analisis SWOT (Strenght-Weakness-Oportunity-Treat), maka kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut:

##### 1. Kekuatan yang dimiliki:

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat,
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai,
- Kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai,
- Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan,

- Hasil pembangunan bidang perkebunan selama ini, dan
  - Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang perkebunan.
2. Peluang yang dimiliki:
- Konsistensi kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan,
  - Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif,
  - Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif,
  - Adanya pengaruh globalisasi, dan
  - Ketergantungan hasil perkebunan masyarakat cukup tinggi.
3. Kelemahan yang dimiliki:
- Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur,
  - Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal,
  - Belum terintegrasi sistem alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan,
  - Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai,
  - Lemahnya penegakan hukum,
  - Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik,
  - Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat, dan
  - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masih rendah.
4. Ancaman yang dimiliki:
- Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan,
  - Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan,
  - Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang,
  - Adanya moratorium izin pengembangan usaha perkebunan,
  - Isu emisi gas rumah kaca,
  - Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warming*, dan
  - Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas.

Sebuah organisasi mempunyai sebuah gambaran optimal dari suatu tatanan kinerja yang ideal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Begitu pula Dinas Perkebunan,

kondisi yang diinginkan sebagai proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan,
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintahan dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal,
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal,
4. Optimalisasi sistem informasi *database* dalam mendukung pembangunan perkebunan,
5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah,
6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perkebunan,
7. Koordinasi internal maupun eksternal secara intensif,
8. Peningkatan konsolidasi internal,
9. Kuatnya komitmen dan motivasi kerja pegawai serta konsistensi kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan, sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan, serta
10. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai, potensi sumber daya lahan cukup luas, serta didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif, sehingga akan tercipta optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam oleh pelaku usaha tani perkebunan dengan pendampingan Dinas Perkebunan.